

BAB III

SOSIALISASI, PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN HASIL AKHIR PROGRAM

KAMPUNG BAHARI TAMBAK LOROK

Peneliti mendeskripsikan temuan penelitian yaitu mengenai pola manajemen sosialisasi program Kampung Bahari Tambak Lorok. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan melibatkan 10 informan, selain itu data sekunder juga peneliti kumpulkan dari dokumen dokumen yang berkaitan, mulai dari desain perencanaan hingga tahap sosialisasi. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan ini melibatkan beberapa tokoh warga Tambak Lorok dan pihak Pemerintah Kota Semarang, yaitu dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Pengawas Satker Kementerian PUPR, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Lurah Tambak Lorok. Berikut informan penelitian yang telah diwawancarai :

Informan pertama yang peneliti wawancarai adalah Arwita (46 tahun). Arwita dipilih menjadi informan pertama karena informan merupakan perwakilan dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang mana merupakan penanggung jawab dari keberjalanan program Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang, Bappeda sendiri merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PUPR untuk mengatur segala hal yang berhubungan tentang perencanaan program

Kampung Bahari Tambak Lorok. Arwita sendiri mengetahui secara detail dari awal proses perencanaan, lanjut ke tahap sosialisasi dan pada akhirnya dimulainya pembangunan fisik. Dari Arwita inilah peneliti mendapatkan nama – nama informan selanjutnya yang memenuhi kriteria yang peneliti tetapkan yaitu Putut C Nugroho, Tiara Setiawan, Pramihardi.

Informan kedua yang dipilih yaitu Putut C Nugroho (51 tahun), berprofesi sebagai salah satu kasie di Dinas Tata Ruang Kota Semarang. Putut C Nugroho dipilih karena informan kedua yang paham mengenai bagaimana proses pembebasan lahan dan perencanaan pasar serta ruang terbuka hijau, dimana proses tersebut dimulai dengan kegiatan sosialisasi. Putut C Nugroho ini yang selalu turun bertemu dengan warga dan menghadapi berbagai kendala yang ditimbulkan oleh warga dan memberikan berbagai solusi atau jalan tengah untuk mendapatkan *win win solution*. Dari Putut C Nugroho ini, muncul informan baru yaitu Subowo, Suparmin, Slamet Riyadi, Slamet Riyanto, Anas Wahyudin, dan Margo Haryadi

Informan ketiga yaitu Tiara Setiawan (35 tahun). Tiara Setiawan merupakan penanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan serta yang berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu Tiara Setiawan yang mengerti bagaimana proses ganti rugi lahan yang dipermasalahkan oleh warga dan bagaimana cara mencari jalan tengah supaya pembangunan program Kampung Bahari Tambak Lorok dapat berjalan lancar.

Informan ke empat yaitu, Pramihardi yang merupakan pengawas proyek yang dikirim oleh Kementerian PUPR, atau yang biasa disebut Satker Pengawas. Dari kegiatan sosialisasi pertama kali, Satker selalu mengikuti berbagai perkembangan dinamika yang terjadi antara warga dan Pemerintah Kota Semarang. Sehingga dengan hal tersebut dapat menjadi salah satu narasumber dalam penelitian ini. Selain itu Satker Kementerian PUPR sendiri juga melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada warga dengan sosialisasi informal.

Informan ke lima yaitu Margo Haryadi (53 tahun), yang merupakan Lurah Tanjung Mas, dimana juga mencakupi wilayah Tambak Lorok. Sebagai Lurah Tanjung Mas sangat paham mengenai awal mula program Kampung Bahari Tambak Lorok dicanangkan, hingga pada tahap sosialisasi serta pelaksanaan pembangunan. Selain itu Margo Haryadi mengetahui bagaimana karakter serta seluk beluk warga Tambak Lorok. Sebagai Lurah Tanjung Mas yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, Lurah Tanjung Mas sering turun ke lapangan untuk melihat berbagai permasalahan yang muncul.

Informan ke enam, yaitu Agus Salim. Agus Salim merupakan koordinator BKM Kelurahan ketika program Kampung Bahari Tambak Lorok ini berjalan. Dalam prosesnya, koordinator memiliki tugas untuk melaksanakan tugas sosialisasi kepada warga Tambak Lorok, sehingga dapat mengetahui bagaimana proses sosialisasi dan juga perkembangan warga mengenai informasi yang beredar di masyarakat.

Informan ke tujuh, yaitu Suparmin. Suparmin dipilih karena merupakan ketua RW 12 yang mana wilayah yang terdampak program Kampung Bahari Tambak Lorok. Selain itu juga mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi dari awal hingga saat ini. Di RW 12 sendiri, Suparmin mengetahui seluk beluk mengenai pemberdayaan warga yang berkembang diwilayahnya dan juga memiliki peran dalam mensosialisasikannya kepada warga mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok.

Informan ke delapan yaitu Slamet Riyadi (49 tahun). Slamet Riyadi ini dipilih karena merupakan tokoh warga dan juga ketua RW 16. Slamet riyadi ini mengetahui betul seluk beluk sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah baik yang formal maupun yang informal. Jadi selama menjadi Ketua RW yang memberikan edukasi ke warga lewat forum forum RT dan RW. Selain itu Slamet Riyadi juga mengetahui bagaimana perkembangan warga yang diberdayakan dengan berbagai program dari Pemerintah Kota Semarang. Slamet Riyadi ini merupakan tokoh yang mendukung atas program Kampung Bahari Tambak Lorok ini.

Informan ke sembilan yaitu Slamet Riyanto (51 tahun). Slamet Riyanto ini masih menjadi ketua RW 15 hingga saat ini, dahulu ketika program Kampung Bahari muncul, yang merupakan tokoh masyarakat. Awal Slamet Riyanto mengikuti sosialisasi yang menolak mengenai lebar ukuran jalan, setelah diberikan pemahaman dan edukasi, akhirnya dapat setuju dan salah satu tokoh yang memperjuangkan program ini agar berjalan dengan baik. Selain itu Slamet

Riyanto juga memiliki peran dalam mensosialisasikan program Kampung Bahari kepada warga melalui bulan jumpa RW dan RT.

Informan kesepuluh, yaitu Subowo. Subowo dipilih karena menjadi penanggung jawab dari pembangunan fisik Kampung Bahari Tambak Lorok dari sisi masyarakat, selain itu merupakan salah satu tokoh masyarakat. Dalam proses berjalanya waktu, Subowo memiliki peran dalam mengedukasi warga yang masih bertanya tanya mengenai program ini serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul baik mengenai ganti rugi lahan dan warga yang menganggur, karena Subowo juga mengajak warga untuk bekerja di lokasi proyek. Selain itu dalam proses pemberdayaanya Subowo juga mengerti karena merupakan ketua RW pada saat program ini dikenalkan pertama kali di masyarakat.

Informan kesebelas yaitu Anas Wahyudin (38 tahun), merupakan salah satu tokoh yang menolak dan hingga saat ini rumahnya masih menghalangi proses pembuatan jalan. Selain alasan tersebut, anas Wahyudin dipilih karena nama tersebut sering disebut di media media massa ketika permasalahan Tambak Lorok dimuat diberbagai media cetak. Dari awal kegiatan sosialisasi, Anas Wahyudin sangat menolak keras mengenai perencanaan yang dijelaskan oleh Pemerintah Kota Semarang, karena menurutnya masih banyak informasi yang tidak diberikan secara keseluruhan, sehingga menurutnya sosialisasi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (*indept interview*) dengan kesembilan informan di atas, peneliti merasa data yang telah dikumpulkan cukup

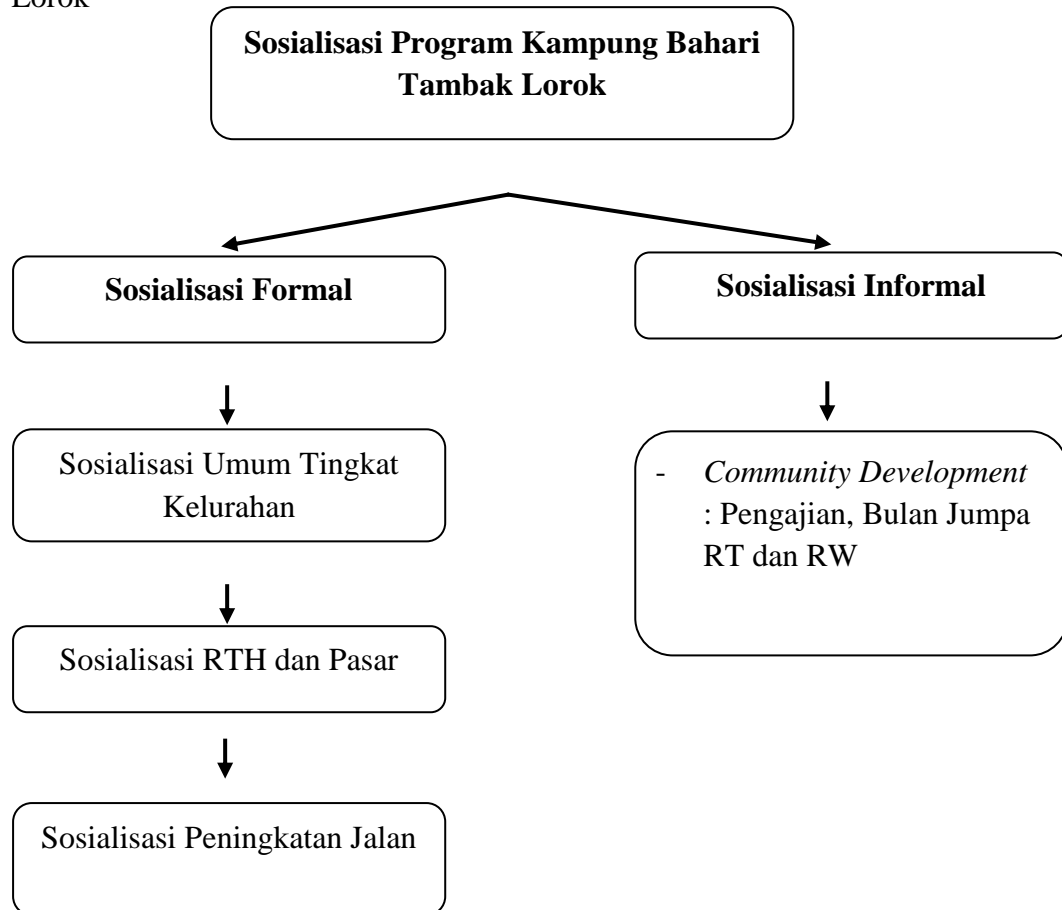
untuk melakukan pengolahan data yaitu : Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok, Pemberdayaan Warga dan Keterlibatan Masyarakat.

3.1. Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok

Program Kampung Bahari Tambak Lorok merupakan salah satu program besar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kawasan kumuh di Kota Semarang, dan sebagai upaya mencapai target kawasan kumuh 0% di Indonesia selain itu juga sebagai upaya untuk mensejahterahkan warga Tambak Lorok, baik dari segi perekonomian, sosial, pendidikan dan kesehatan. Lokasi pembangunan ini berada di Kampung Tambak Lorok yaitu pada wilayah administratif RW 12 – RW 16 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Seluruh RW tersebut menerima berbagai kegiatan sosialisasi yang sesuai dengan pembangunan yang akan berjalan.

Gambar 3.1.1 Skema Alur Sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak

Lorok



Skema tersebut merupakan sebuah strategi dimana Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda, informan 1 dan 2 menjelaskan bahwa urutan urutan sosialisasi telah direncanakan pada awal ketika koordinasi dengan seluruh *stakeholder*. Strategi tersebut berguna untuk memudahkan proses sosialisasi dan memudahkan warga untuk memahami perencanaan pembangunan dari Kampung Bahari Tambak Lorok.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda dan seluruh *stakeholder* terkait dilakukan dengan jalur formal dan

informal. Sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai perencanaan dan konsep tentang Kampung Bahari kepada masyarakat. Pada jalur formal dilakukan dengan sosialisasi resmi.

Sosialisasi formal atau resmi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan tahapan awal penyampaian informasi kepada warga Tambak Lorok dengan tujuan agar pembangunan berjalan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh warga Tambak Lorok. Sosialisasi resmi ini dilakukan dengan bertatap muka dengan warga secara langsung di balai kelurahan atau tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Sosialisasi yang sudah dilaksanakan di wilayah Tambak Lorok dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari sosialisasi umum di Balai Kelurahan, sosialisasi RTH dan pasar dan yang terakhir yaitu sosialisasi pembangunan jalan. Di dalam proses sosialisasi itu, sosialisasi yang dilaksanakan juga oleh masing-masing perangkat wilayah, yaitu Ketua RT dan Ketua RW. Materi sosialisasi program Kampung Bahari Tambak Lorok disajikan dalam bentuk makalah dimana makalah tersebut merupakan *power point* dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu warga juga dilibatkan perencanaan Kampung Bahari Tambak Lorok dalam bentuk gambar dan video, sehingga mempermudah warga untuk memahami materi yang disampaikan. Materi sosialisasi ini berisikan gambaran umum mengenai Kota Semarang, kemudian latar belakang adanya program Kampung Bahari Tambak Lorok, profil wilayah Tambak Lorok, perencanaan Kampung Bahari Tambak Lorok dan dampak positif pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok dari berbagai aspek.

Sosialisasi informal berupa pemberdayaan warga (*community development*). Dalam melaksanakan pemberdayaan warga dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga melalui kegiatan bulan jumpa yang dilaksanakan di tiap tiap RW. Dalam kegiatan tersebut Ketua RW memiliki peran untuk memberikan informasi apa saja yang telah disampaikan pihak Pemerintah Kota Semarang, mana kala ketika ada warga yang belum mengetahui informasi dan belum memahami, dengan forum ini diharapkan warga yang sudah paham semakin paham, sedangkan untuk warga yang belum mengetahui informasi dapat menerima informasi dengan lengkap sehingga dapat mendukung program ini. Selain itu perang perangkat kelurahan dalam kegiatan sosialisasi, juga menggunakan cara *door to door*, dimana selalu datang diberbagai kegiatan bulan jumpa yang dilaksanakn oleh Ketua RW di Tambak Lorok, dengan cara itu Lurah Tanjung Mas mengetahui berbagai kendala yang dialami warga , karena bertemu secara tatap muka dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh mereka.

3.2. Sosialisasi Umum Tingkat Kelurahan

Sosialisasi umum tingkat kelurahan dilaksanakan di Balai Kelurahan Tanjung Mas dengan memberikan gambaran umum dari perencanaan Program Kampung Bahari Tambak Lorok. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan pada malam hari, mengingat mayoritas warga bermata pencaharian sebagai nelayan dan pengusaha, dan waktu kosong mereka ketika malam hari. Pada sosialisasi ini informasi yang disampaikan berupa rencana pembangunan Program Kampung Bahari Tambak Lorok, lokasi pembangunan, lahan yang dibutuhkan, serta dampak positif dan negatifnya. Sosialisasi ini juga menggunakan alat bantu untuk memperjelas materi

sosialisasi berbentuk makalah serta gambar dan video yang ditampilkan . Hal ini dikemukakan langsung oleh Arwita yang menyebutkan mengenai penggunaan makalah, video dan gambar dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, juga diutarakan bahwa sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, Bappeda memanggil beberapa perwakilan warga Tambak Lorok yang meliputi tokoh warga dan ketua RW untuk memberikan informasi awal dan guna persiapan pelaksanaan sosialisasi untuk seterusnya

Informan 1 menegaskan bahwa sebelum kegiatan tersebut terdapat kegiatan koordinasi yang dinamakan FGD (*focus group discussion*), dalam forum tersebut yang dihadirkan yaitu dari seluruh *stakeholder* meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, BBWS Pamali Juana, BPN, Camat Semarang Utara, Lurah Tanjung Mas serta beberapa tokoh masyarakat. Dalam FGD tersebut membahas mengenai persiapan sosialisasi, hal hal apa saja yang perlu dipersiapkan, dari materi, media yang digunakan serta pemilihan bahasa yang digunakan. Hal tersebut penting untuk dipersiapkan untuk meminimalkan kesalahpahaman antara pihak pemrakarsa dan masyarakat. Jadi dari awal, Bappeda telah mempersiapkan dengan matang bagaimana berkomunikasi dengan warga supaya mereka paham dan ikut mendukung program tersebut. Selain itu dalam forum tersebut juga ditambahkan mengenai pemberitahuan informasi umum mengenai Program Kampung Bahari Tambak Lorok.

Informan 5, Lurah Tanjung Mas, mengatakan bahwa kegiatan FGD (*focus group discussion*) diadakan oleh Bappeda, dimana dalam kegiatan tersebut menjadi awal permulaan informasi mengenai program Kampung Bahari Tambak

Lorok, dalam kegiatan tersebut peran lurah dihadirkan sebagai pihak yang mengetahui secara mendalam bagaimana kondisi dan karakter warga Tambak Lorok, sehingga ketika program ini berjalan di lapangan, pelaksana proyek dapat mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan. Selain itu, posisi lurah menjadi pihak ketiga dalam artian, memiliki peran untuk mensosialisasikan kepada warga di luar sosialisasi besar, karena sosialisasi besar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Pentingnya pihak ketiga disini untuk mempercepat proses komunikasi yang dijalin antara pelaksana dan masyarakat, untuk memberikan kemudahan ketika pembangunan berjalan. Koordinasi awal atau FGD ini menjadi tempat seluruh *stakeholder* terkait untuk memberikan pandangannya tentang Tambak Lorok, dimulai dari penjelasan tentang programnya, dilanjutkan dengan karakter karakter warga Tambak Lorok dan yang terakhir kondisi sosial, lingkungan dan perekonomian.

3.3. Sosialisasi RTH dan Pasar

Sosialisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau dan Pasar) merupakan kewenangan dari Dinas Tata Ruang, dimana perencanaan awal sudah diselesaikan konsepnya oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Konsep tersebut yaitu mengenai RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dari Kampung Kampung Bahari Tambak Lorok. Dari RTBL tersebut dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, serta konsep apa saja yang akan dibangun. Mengutip penjelasan dari Putut C Nugroho, program ini merupakan langkah awal untuk memberikan perubahan di Kampung Tambak Lorok, dimana pembangunan RTH akan memberikan lingkungan yang nyaman dan adanya area bermain bagi

anak-anak dan warga disana, kemudian dari segi pasar, lokasi tersebut merupakan akses penting dalam kegiatan jual beli warga Tambak Lorok, jadi ketika program ini disosialisasikan, warga sangat mendukung dan tidak ada penolakan, walaupun masih ada beberapa warga yang tidak sesuai dengan ganti uang yang diberikan, selain itu dikarenakan adanya harga ganti untung yang diberikan oleh pemerintah. Sesuai kata Putut C Nugroho (informan 2), ganti rugi untung tersebut untuk mempercepat proses pembebasan lahan dan pembangunan bisa cepat terlaksana, karena dalam pembangunan ini berbeda dengan program pembangunan pada umumnya, dalam Program Kampung Bahari Tambak Lorok, pembebasan lahan dan pembangunan berjalan beriringan, jadi kendala-kendala di lapangan yang tidak sesuai target waktu yang diberikan, karena sudah perpanjangan waktu hingga 4 kali, yaitu terakhir pada bulan April 2019. Kendala terbesar yaitu persoalan lahan jalan yang belum selesai dan beberapa bidang tanah yang belum ada kejelasan.

Informan 10 (Subowo) sebagai salah satu tokoh warga di Tambak Lorok, menjelaskan sosialisasi yang dilaksanakan selama pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok ini, menghadapi berbagai kendala, baik yang itu mendukung atau penolakan, hal itu sudah biasa dalam pembangunan. Jadi dengan adanya sosialisasi yang salah satunya mendapatkan jalan tengah untuk warga yang belum setuju dan masih menolak. Sosialisasi yang dilaksanakan pun telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dari penggunaan media yang dipilih yaitu melalui gambar, video dan materi makalah yang diberikan Pemerintah Kota Semarang, mempermudah warga untuk memahami perencanaan pembangu

kedepannya. Selain itu, Bowo juga mengutarakan bahwa dirinya juga memiliki peran untuk mensosialisasikan kepada warga , ketika kegiatan bulan jumpa bersama ketua ketua RW, serta selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan, karena apabila ada kendala segera dicarikan solusi, sehingga tidak memperlambat proses pembangunan.

3.4. Sosialisasi Peningkatan Jalan

Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini, memiliki tanggung jawab dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan jalan. Tiara menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan ini, menemui berbagai kendala di lapangan, yang terbesar yaitu pembebasan lahan yang belum 100%. Padahal lahan tersebut merupakan peranan penting dalam pembangnan jalan, ketika tanah atau bangunan belum dibebaskan, pembangunan jalan belum bisa dilaksanakan, jadi kenyataan dilapangan, pembangunan jalanya putus nyambung, karena ada beberapa rumah yang masih menghalangi. Hal itu hingga saat ini masih terus dalam proses penyelesaian ganti untung yang diberikan kepada warga yang bersangkutan. Hingga pada akhirnya, uang ganti untung telah dititipkan di pengadilan, karena tidak menemui titik tengah antara keduanya pihak.

Informan 3 menyatakan proses sosialisasi yang dilaksanakan telah berjalan dari bulan Juni 2018, dari awal tersebut kami memberikan sosialisasi mengenai konsep perencanaan awal terlebih dahulu, kemudian menjelaskan mengenai bidang bidang tanah/rumah yang terdampak proyek, kemudian berpindah fokus mengenai ganti rugi/untung lahan. Warga itu khawatir dan muncul banyak pertanyaan, apakah rumahnya terkena atau tidak dan bagaimana proses

penggantian uangnya. Oleh karena itu, tim appraisal yang didatangkan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki peran untuk menghitung seberapa besar uang yang harus diganti oleh Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Informan 5 juga menjelaskan bahwa proses sosialisasi yang cukup membutuhkan waktu hingga beberapa kali, yaitu pada tahap pembangunan jalan, ada kurang lebih 6 warga yang belum setuju dengan ganti untung yang diberikan. Padahal berbagai cara sudah dilakukan, hingga Lurah Tanjung Mas turun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan warga-warga yang menolak dan mencari titik jalan tengahnya.

3.5. Perencanaan Sosialisasi Program Kampung Bahari

Tambak Lorok

Perencanaan merupakan sebuah awal dalam persiapan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi penanggung jawab. Persiapan diawali dengan melakukan koordinasi dengan mengundang seluruh dinas terkait untuk hadir di FGD (*Focus Group Discussion*) di Gedung Balaikota yang dipimpin oleh Pj. Walikota Semarang. Informan 1 menyatakan, koordinasi sangat penting dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dalam pembangunan program Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang, dimana program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, sehingga harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu persiapan awal dalam melaksanakan sosialisasi adalah mengumpulkan

seluruh jajaran dinas terkait, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Satker PUPR, Camat Semarang Utara, Lurah Tanjung Mas, tokoh warga dan beberapa perwakilan warga Tambak Lorok. Dalam kegiatan yang bertajuk FGD tersebut fokus pembahasan mengenai persiapan sosialisasi yang meliputi pengenalan karakter dari warga tambak lorok, kemudian penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh warga, media yang digunakan, dan pemilihan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi. Selain pembahasan itu juga dijelaskan mengenai sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, namun seluruh *stakeholder* yang hadir memiliki peran untuk sosialisasi kepada warga baik itu formal maupun informal, atau biasa disebut kepanjangan tangan dari pihak pemerintah.

Informan 3 menjelaskan mengenai kegiatan koordinasi awal dalam persiapan pelaksanaan sosialisasi, dan membenarkan penggunaan bahasa yang campur merupakan cara tepat untuk semakin dekat dengan warga Tambak Lorok karena dengan penggunaan bahasa memperkecil tingkat kesalahpahaman dari informasi yang disampaikan, selain itu dari penggunaan bahasa tersebut, warga juga segan untuk memulai interaksi dengan *stakeholder* yang hadir di kegiatan sosialisasi atau di lapangan. Kemudian untuk pemilihan media yang digunakan berupa gambar, video, dan makalah mempermudah warga untuk memahami perencanaan Program Kampung Bahari Tambak Lorok yang akan dibangun.

Informan 1,2 dan 3 menyatakan bahwa ketika koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait, menekankan untuk memahami karakter warga Tambak Lorok yang keras dan perlunya cara cara menghadapi mereka dengan pendekatan yang

lemah lembut, tidak boleh sama sama kerasnya, kalau sama sama kerasnya, akan mempersulit komunikasi yang sudah selama ini dibangun. Kemudian, untuk konsep sosialisasi yang digunakan yaitu menggunakan konsep sosialisasi *bottom-up* dan *top-down*. Dimana konsep tersebut terbagi secara rata 50 : 50, cara tersebut digunakan supaya warga memiliki peran dalam proses pembangunan ini, jadi tidak semua perencanaan datang dari pemerintah, namun ada peran dari warga memberikan usulan atau kebijakan yang lebih tepat dengan program yang telah direncanakan. Selain hal itu, dalam kegiatan sosialisasi, penggunaan pihak ketiga memiliki peran penting untuk mensosialisasikan kepada warga Tambak Lorok secara luas. Pihak ketiga disini yang dimaksud adalah tokoh warga atau orang yang dituakan. Tokoh ini merupakan tokoh yang dipercayai dan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang dianggap lebih oleh warga seperti perangkat kelurahan, tokoh agama, tokoh adat dan pelindung kelurahan. Dalam kegiatan sosialisasi juga disampaikan mengenai konsep pemberdayaan warga dimana warga akan diberdayakan menjadi mandiri, kemandirian disini dapat dipahami sebagai bekal untuk memulai sebuah usaha, atau membuka peluang peluang bisnis yang menjual produk khas warga pesisir.

Informan 2 dan 4 menyatakan pendekatan ke warga perlu dilakukan untuk menyesuaikan karakter warga pesisir yang keras, karena dengan cara itu, sosialisasi dapat diterima dengan mudah oleh warga Tambak Lorok. Melihat program ini merupakan arah langsung dari Presiden RI, dalam proses pembangunan selalu dikejar dengan waktu dan harus segera selesai. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, penggunaan bahasa dan media yang tepat telah

mempermudah proses sosialisasi kepada warga Tambak Lorok. Selain hal itu, Informan 1 menambahkan mengenai pemilihan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi, yaitu pada malam hari, pemilihan tersebut berguna untuk memaksimalkan waktu luang yang dimiliki oleh warga Tambak Lorok yang terdampak dimana mereka telah pulang dari aktivitas kerja, yaitu nelayan dan berdagang. Dengan pemilihan waktu tersebut terbukti efektif dan efisien, banyak warga yang ikut hadir dalam sosialisasi yang puluhan kali dilaksanakan, mulai dari sosialisasi umum tingkat kelurahan, kemudian sosialisasi RTH dan Pasar dan sosialisasi peningkatan jalan. Kemudian pemilihan narasumber yang bertugas untuk memberikan informasi atau materi kepada warga Tambak Lorok memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan-pesan berkaitan tentang program pembangunan kampung bahari, narasumber yang dipilih memiliki pengetahuan yang luas mengenai materi yang akan disampaikan dan yang tidak kalah penting yaitu komunikatif kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal yang sama juga diutarakan oleh informan 3 dan 4, mengenai pemilihan narasumber.

Informan 4 menyatakan bahwa, dalam pembuatan materi yang akan dijelaskan kepada warga selalu melalui tahapan – tahapan kontrol yang diawasi oleh informan 5, ketika *draft* materi sudah selesai dikerjakan, *draft* tersebut diberikan kepada Lurah Tanjung Mas, apakah penggunaan bahasa yang dipilih dapat dipahami oleh warga Tambak Lorok atau tidak. Hal tersebut merupakan salah satu dari berbagai cara yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* dalam upaya memberikan sosialisasi yang efektif dan efisien. Selain hal itu, cara-cara

untuk dekat dengan warga adalah memunculkan suatu kondisi dimana warga itu merasa “diwongke” atau diperhatikan, contoh kecilnya itu diajak berinteraksi, supaya tidak ada jarak antara warga dan pelaksana program. Kegiatan sosialisasi telah menjadi tanggung jawab dari masing masing dinas terkait, tiap *stakeholder* telah memiliki jadwal untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan, setiap akan melaksanakan sosialisasi, mereka berkoordinasi dengan Bappeda, Satker Kementerian PUPR, Lurah Tanjung Mas dan tokoh tokoh masyarakat. Masing masing dinas memiliki kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi secara bebas, dimulai dari Bappeda yang telah melaksanakan sosialisasi selama tiga kali, dilanjutkan Dinas Tata Ruang yang telah melaksanakan sosialisasi kurang lebih lima kali dan terakhir Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan sosialisasi hingga tujuh kali. Bappeda sendiri memulai kegiatan sosialisasi mulai tahun 2016 akhir hingga 2017, kemudian Dinas Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum pada 2017 hingga 2019. Disetiap kegiatan sosialisasi yang membutuhkan koordinasi seluruh *stakeholder*, seluruh dinas terkait hadir pada kegiatan sosialisasi.

Informan 5, Lurah Tanjung Mas, membenarkan bahwa ketika awal program ini hadir di wilayah Tambak Lorok, Bappeda mengundang seluruh pemangku kepentingan di wilayah Tambak Lorok termasuk perwakilan tokoh warga serta turut hadir informan 1 hingga 4. Dalam FGD tersebut yang dibahas yaitu mengenai rencana sosialisasi, konsep Kampung Bahari yang akan dibangun, waktu pelaksanaan sosialisasi, penggunaan bahasa, konsep pemberdayaan dan juga penggunaan pihak ketiga sebagai salah satu cara mempercepat proses

sosialisasi ke warga secara luas. Sedangkan tokoh warga yang hadir juga yaitu informan 10, menjelaskan bahwa ketika diundang dalam FGD, pokok pokok bahasan yang dibahas yaitu mengenai pendekatan yang dipilih untuk bersosialisasi kepada masyarakat, cara menghadapi karakter warga pesisir yang keras, kemudian membahas mengenai konsep perencanaan sosialisasi. Selain itu penjelasan mengenai tugas tugas dan peran tokoh warga sebagai pihak ketiga.

Pelaksanaan sosialisasi yang terbai menjadi tiga kegiatan, yang dimulai dari sosialisasi umum tingkat kelurahan hingga sosialisasi akhir mengenai peningkatan jalan, dijelaskan oleh informan 1 dan 2 bahwa hal tersebut, merupakan sebuah strategi untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada warga mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok, dengan adanya informasi awal tersebut, warga sudah memahami latar belakang adanya pembangunan Kampung Bahari, setelah itu baru diberikan edukasi tambahan mengenai RTH, pasar dan peningkatan jalan. Sosialisais yang bertahap tersebut untuk memberikan warga memahami pesan pesan yang dikomunikasikan oleh narasumber dapat dipahami secara detail dan menyeluruh.

3.6. Pelaksanaan Sosialisasi Program Kampung Bahari

Tambak Lorok

Sosialisasi yang telah dilaksanakan hingga 2019 telah berlangsung puluhan kali, dimulai dari sosialisasi umum tentang program Kampung Bahari secara keseluruhan ditingkat kelurahan, kemudian masuk pada sosialisasi RTH (ruang

Terbuka Hijau) dan pasar, lanjut ke sosialisasi peningkatan jalan. Dalam pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut:

- Pertama, yaitu pada tahap sosialisasi umum tingkat kelurahan yang menjadi tanggung jawab dari Bappeda Kota Semarang. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan selama tiga kali. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh *stakeholder* terkait dan juga tokoh warga serta warga warga yang terdampak. Kegiatan tersebut dimulai dengan pengenalan umum mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok serta tujuan dan manfaatnya. Setelah selesai memberikan penjelasan, warga dan tokoh warga diberikan waktu untuk terliibat dalam kegiatan tersebut, dibuka sesi tanya jawab.

Informan 10 beserta informan 7,8 dan 9 mengatakan bahwa dalam kegiatan sosialisasi awal itu, warga sangat antusias dan mendukung dengan kegiatan Program Kampung Bahari Tambak Lorok, namun ada juga warga yang menolak karena rumahnya terkena proyek, dan juga ada lagi pro kontra dalam masyarakat. Warga itu pada umumnya menerima program ini, hanya terdapat beberapa warga yang masih menolak hingga saat ini. Warga disini itu sangat menerima adanya pembangunan apalagi melihat kampungnya dibenahi, pasti sangat senang, namun cara cara pendekatan ke warga sini memang berbeda dengan pendekatan ke warga kota. Melihat karakteristik warga pesisir yang keras, membutuhkan cara cara khusus untuk melaksanakan sosialisasi. Sebagai salah satu tokoh warga di Tambak Lorok, Informan 10 menilai warga disini itu ada dua jenis, ada yang paham dengan program yang dihadirkan oleh pemerintah, ada yang tidak ingin paham,

orang-orang tersebut yang memang juga terdampak tanah dan tokonya pada program Kampung Bahari Tambak Lorok. Warga-warga yang tidak mau paham seperti itu yang menjadi salah satu kendala ketika program sedang berjalan, dilain pihak mayoritas warga mendukung atas pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Subowo juga memiliki peran untuk melakukan pendekatan terhadap warga-warga yang saat ini belum bisa menerima adanya program pembangunan serta juga melakukan sosialisasi secara informal ke warga-warga di RW 13. Tujuan yang ingin dicapai agar seluruh warga mendukung dengan program ini.

Informan 6,7, dan 8 menambahkan, bahwa proses sosialisasi yang awal itu mencakupi seluruh tokoh warga dan beberapa warga terdampak yang hadir. Dalam sosialisasi itu warga dengan pemerintah kota saling adu argumen tapi tetap dalam situasi kondusif. Dalam kegiatan tersebut diberikan penjelasan awal mengenai latar belakang adanya program Kampung Bahari Tambak Lorok atas respon dari kunjungan Presiden RI serta ditambah faktor-faktor lingkungan, sosial dan perekonomian. Walaupun secara mayoritas mendukung, tapi ada beberapa yang khawatir atas status tanah mereka, apakah ikut terkena dampak atau tidak, dan bagaimana perihal ganti ruginya. Ketakutan tersebut muncul di beberapa warga yang hadir.

Informan 1,3 dan 4 menjelaskan, dalam persiapan yang telah dibahas oleh berbagai *stakeholder*, dipersiapkan cara-cara yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Salah satunya kekhawatiran dari masyarakat. Pemerintah Kota Semarang menggunakan pihak ketiga sebagai

kepanjangan tangan dari pihak Pemerintah Kota Semarang, dimana memiliki peran untuk melaksanakan sosialisasi kepada warga dan juga melakukan pendataan, kelompok – kelompok mana saja yang masih susah untuk atau masih belum paham, dan kelompok mana saja yang mudah untuk dikoordinasikan. Dengan cara tersebut, dapat terlihat kelompok mana saja yang membutuhkan perhatian lebih, dan pada akhirnya proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Kegiatan sosialisasi yang selalu dikoordinir langsung oleh Bappeda biasa dilaksanakan saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00. Pemilihan waktu malam, dikarenakan banyak warga yang masih bekerja pada sore harinya, baik itu sebagai nelayan atau pedagang, dan juga untuk melaksanakan kegiatan yang efisien dan efektif, dari beberapa kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana, secara umum kegiatan selesai pada pukul 23.00 WIB.

Informan 7,8 dan 9 menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi umum di tingkat kelurahan selama tiga kali, peran tokoh - tokoh warga dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi memiliki peran yang penting dan sangat membantu, setelah kegiatan sosialisasi besar (tingkat kelurahan), tokoh tokoh warga memberikan info yang telah didapat ketika sosialisasi kepada warga secara umum melalui forum warga yang diadakan tiap bulanya yaitu bulan juma. Tokoh warga menjelaskan dari latar belakang, perencanaanya seperti apa hingga kepada tujuan pembangunan, dan yang tidak kalah penting yaitu menanggapi rasa kekhawatiran beberapa

warga mengenai status tanahnya dan bagaimana ganti ruginya, juga dijelaskan kepada masyarakat.

Informan 9 menambahkan, peran tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi menjadi solusi dan tempat untuk warga berdiskusi mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok. Dari interaksi kepada warga tersebut, tokoh warga dapat menangkap informasi dari respon warga yang ditunjukkan, dan hal hal apa saja yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ketika adanya koordinasi dengan seluruh *stakeholder*, tokoh warga memiliki kesempatan untuk melaporkan sejauh mana proses sosialisasi yang dilaksanakan, dan kendala apa saja yang muncul, sehingga dengan laporan tersebut, dinas – dinas terkait menyiapkan solusi solusi atau jalan tengah ketika turun ke lapangan.

- Kedua, pada tahap sosialisasi RTH dan Pasar. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sama seperti dengan kegiatan sosialisasi yang pertama, yaitu pada tingkat kelurahan. Kegiatan sosialisasi berlangsung pada malam hari dengan peserta hanya terdiri dari warga yang rumah atau tanahnya terdampak pembangunan, yaitu disepanjang jalan akses ke Tambak Lorok dari RW 12 hingga RW 15. Sosialisasi formal dilaksanakan selama 3 hingga 4 kali, sisanya sosialisasi yang informal.

Informan 4 dan 5 menyatakan sosialisasi yang pertama menjelaskan mengenai perencanaan pembangunan RTH dan Pasar tersebut awalnya

tidak menjadi prioritas utama yang dibangun awal, pembangunan yang utama yaitu akses jalan ke Tambak Lorok. Namun setelah melaksanakan mediasi dengan berbagai *stakeholder* dari Dinas Tata Ruang dan Bappeda serta tokoh warga dan warga terdampak, diputuskan bahwa pembangunan RTH dan Pasar diutamakan, karena ketika akses jalan sudah jadi tapi tidak ada lokasi tujuan yang diinginkan akan sia sia juga. Jadi pembangunan jalan menjadi prioritas kedua, tapi tetap dilakukan pembangunan ketika RTH dan Pasar lebih dimaksimalkan proses pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan khusus untuk program Kampung Bahari Tambak Lorok ini berbeda dari pembangunan program Kementerian PUPR, dimana program ini merupakan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia, sehingga seluruh *stakeholder* terkait gerak cepat dan diberikan target untuk diselesaikan. Dalam keberjalanan pembangunan terdapat berbagai kendala, pertama karakter warga yang *labil* atau tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati, contohnya, ketika ada pembangunan saluran di depan rumah warga , warga meminta uang ganti sebesar 1 juta rupiah kepada pelaksana, setelah melukan mediasi antara warga tersebut dengan pelaksana, disepakati nilai 1 juta tersebut. Pekerja baru bisa melaksanakan pembangunan saluran pada hari esoknya, ketika pekerja sedang melakukan pekerjaan saluran, pemilik rumah menghalang – halangi proses pekerjaan, padahal sudah disepakati nilai ganti sebesar 1 juta, pemilik mengatakan bahwa hal itu merupakan kesepakatan yang kemarin, hari ini tidak bisa seperti itu. Dari kasus tersebut menjadi

pembelajar bagi pihak pelaksana, kedepanya ketika ada permasalahan yang serupa dapat dilaksanakan pada hari kesepakatan dibuat. Selain permasalahan tersebut, dalam proses sosialisasi yang juga dilaksanakan oleh informan 4, mengalami berbagai kendala, dimana dalam kegiatan sosialisasi informal kepada tokoh tokoh masyarakat, di Kampung Tambak Lorok tersebut memiliki banyak tokoh warga di tiap wilayahnya, di tiap RW memiliki tokoh warga yang berbeda dan juga aturan aturan yang berbeda juga. Sehingga ketika ada proses pembangunan yang bersinggungan langsung dengan wilayah RW, harus koordinasi dengan tokoh warga yang bersangkutan. Pada umumnya tokoh warga itu hanya beberapa di suatu wilayah, sehingga ketika ada pembangunan di suatu daerah, cukup melakukan koordinasi ke satu hingga dua tokoh masyarakat, sehingga dapat mempercepat alur sosialisasi. Pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok ini, informan 4 sebagai pengawas satker dari Kementerian PUPR, memiliki cara khusus untuk melaksanakan sosialisasi yang informal, dimana berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, akan diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan oleh internal masyarakat, yaitu cara penyelesaian masalah dengan dihadapkan oleh warga nya sendiri, dimana warga tersebut merupakan tokoh warga sehingga bisa mempermudah mediasi yang dilaksanakan. Cara tersebut dipilih supaya tidak ada orang luar yang ikut campur dengan permasalahan warga . Informan 4 menambahkan, konsep sosialisasi yang *bottom-up* juga telah dilaksanakan dalam program Kampung Bahari ini, salah satunya

yaitu ketika sosialisasi ketiga, mengenai desain jalan dekat lokasi pasar, warga mengusulkan bahwa jalur putar balik yang telah didesain itu terlalu jauh dari lokasi pasar, setelah usulan tersebut, pemangku kepentingan baik yang dilapangan atau dari dinas terkait membahas usulan tersebut dan pada akhirnya menyetujui usulan dari masyarakat. Cara ini dilakukan tidak lain untuk memberikan kenyamanan di masyarakat.

Informan 2 mengatakan bahwa dalam pembangunan RTH dan Pasar menjadi tanggung jawab dari Dinas Tata Ruang, dimana konsep penataan Kampung Tambak Lorok merupakan hasil koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang. Dari konsep penataan kawasan tersebut, hal yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dimana sosialisasi awal itu dilaksanakan pada akhir Oktober 2015. Dalam setiap kegiatan sosialisasi Dinas Tata Ruang memberikan penjelasan melalui gambar gambar dan video serta konsep perencanaan dalam bentuk *power point*. Setiap pelaksanaan sosialisasi, materi dijelaskan langsung oleh penanggung jawab yaitu dari perwakilan Dinas Tata Ruang yaitu koordinator atau penanggung jawab dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok. Materi atau narasumber menggunakan teknik komunikasi dua arah setiap kali sosialisasi, sehingga membuka keterlibatan warga untuk bertanya, memberikan kritik saran serta usul dan dijawab langsung oleh narasumber. Memasuki sosialisasi ke tiga hingga ke lima, kegiatan difokuskan pembebasan lahan, dalam proses pembebasan lahan di area pembangunan pasar dan RTH mengalami berbagai kendala, yaitu

berkoordinasi dengan pemilik lahan pasar yang lama atau lapak, koordinasi dengan pemilik lahan atau yang mengatur yaitu KUD (Koperasi Unit Desa), ada beberapa warga yang telah terikat janji hitam diatas putih sebagai bukti kepemilikan sah atas lapak, diperjual belikan kepada orang lain, sehingga ketika uang tali asih telah disepakati bersama Pemerintah Kota Semarang, warga warga yang saat ini telah menempatai lapak pasar yang lama, menunggu uang tali asih tersebut, namun pada kenyataanya, uang tali asih tersebut diberikan kepada nama nama yang tercatat sebagai pemilik resmi lapak tersebut, sehingga hal tersebut memunculkan permasalahan, sehingga ketika sosialisasi dipertemukan warga warga yang terdampak dan juga perwakilan dari KUD. Dari hasil kesepakatan didapatkan warga warga pengguna lapak saat ini harus didata terlebih dahulu kemudian baru bisa mendapatkan tali asih.

Informan 6 dan 8 menambahkan, setelah sosialisasi pertama hingga kedua, sosialisasi ke dua hingga ke empat kurang lebih hampir sama, yaitu diawali dengan penjelasan perkembangan pembangunan dari RTH dan Pasar, setelah itu difokuskan untuk membahas mengenai ganti rugi lahan yang telah disepakati antara pihak pemerintah dengan pemilik tanah dan pemilik lapak. Sosialisasi ke dua hingga ke empat ditekankan mengenai ganti rugi, pendataan warga yang terdampak dimulai dari area pasar terlebih dahulu baru berlanjut ke area RTH. Informan 6 yang juga sebagai koordinator BKM, memiliki tanggung jawab yang sama dengan tokoh masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi ke tingkat warga baik itu secara

formal maupun informal. Cara yang dilakukan yaitu menghampiri warga warga yang sedang kumpul kumpul di warung, selain itu juga menghadiri berbagai kegiatan warga masyarakat, seperti pengajian. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh informan 6 yang tidak lain adalah Ketua RW dari 14, menjelaskan bahwa di wilayahnya, masih terdapat warga warga yang belum paham mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok, ada beberapa warga yang mendapatkan informasi akan ada pelabuhan, jadi ada pengusuran dan pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Sebagai tugas Ketua RW, informan 6 *intens* melaksanakan sosialisasi yang informal kepada warga nya. Setelah itu tiap minggunya, informan 6 melaksanakan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan seluruh Ketua RW di wilayah terdampak dari RW 12 hingga RW 16. Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai permasalahan yang muncul, kemudian dikelompokkan mana permasalahan yang kecil dan besar kemudian untuk masalah masalah yang mudah, langsung dicarikan solusi secara bersama sama, namun untuk permasalahan yang besar seperti ganti rugi lahan, menjadi kewenangan Lurah Tanjung Mas untuk melaporkanya ke dinas – dinas yang bersangkutan.

Informan 2 dan 3 menambahkan dalam proses sosialisasi tahap akhir, yaitu selain membahas perihal ganti rugi juga membahas tentang penggunaan pasar. Saat pembangunan pasar berlangsung pemilik lapak yang berjualan sebelumnya di relokasi ke area jalan diseberang pasar. Dalam sosialisasi yang kelima, dihadiri oleh pemilik pemilik lapak pasar.

Setelah dijelaskan mengenai konsep pembangunan pasar oleh perwakilan Dinas Tata Ruang, warga menanyakan bagaimana lapak kami nantinya, bagaimana kami berjualan ketika pembangunan pasar sedang berlangsung. Permasalahan tersebut langsung dijawab oleh informan 2, mengenai hal tersebut seluruh pedagang dapat tepat berjualan seperti biasanya, namun lokasinya akan dipindah di seberang pasar. Pada awalnya pemilik lapak menolak, namun setelah dijelaskan kembali manfaat dari pembangunan pasar dan memberikan bantuan berupa lokasi berjualan di depan pasar, pemilik lapak setuju untuk pindah. Setelah pembangunan pasar selesai pada bulan Maret 2019, dari target yaitu bulan April 2019, pemilik lapak melakukan mediasi ke beberapa tokoh warga dan juga Lurah Tanjung Mas, supaya segera dipindahkan ke pasar.

Informan 4 juga menyatakan bahwa keinginan pemilik lapak ingin segera dipindahkan ke pasar yang telah selesai dibangun. Namun melihat aturan yang ada, pasar baru dapat digunakan setelah serah terima dari pelaksana proyek ke Pemerintah Kota Semarang yang diwakili Dinas Tata Ruang. Melihat permasalahan tersebut, Dinas Tata Ruang mengumpulkan seluruh *stakeholder* meliputi Bappeda, Lurah Tanjung Mas, tokoh tokoh warga dan juga pemilik lapak, mencari jalan tengah. Setelah melalui beberapa kali musyawarah, akhirnya disepakati dengan pelaksana proyek, pemilik lapak yang awalnya berjualan di depan pasar dapat dipindahkan ke area pasar yang baru. Acara pemindahan ke pasar baru tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi bersama jajaranya.

- Ketiga, sosialisasi tentang peningkatan jalan. Sosialisasi ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum. Sosialisasi telah dilaksanakan kurang lebih tujuh kali dari awal sosialisasi umum hingga selesainya pembebasan tanah dan bangunan. Peningkatan jalan ini dilakukan disepanjang jalan akses mulai dari jalan masuk hingga ke ujung Tambak Lorok dengan lebar jalan total 20 meter. Sosialisasi pertama yaitu di 2018 tepatnya di Balai Kelurahan.

Informan 3, sebagai koordinator dari Dinas Pekerjaan Umum dalam proyek ini, menjelaskan bahwa awal sosialisasi dimulai dengan informasi umum mengenai pekerjaan peningkatan jalan, meliputi ukuran jalan, lebar jalan, dan teknik pembangunan. Kemudian pada sosialisasi kedua membahas tentang lahan mana saja yang terkena dengan proyek tersebut disertai pendataan rumah rumah warga yang terdampak. Mulai sosialisasi pertama banyak bermunculan penolakan dari warga, dengan alasan lebar jalan terlalu lebar, padahal ini kampung kecil, jadi tidak sesuai, kemudian ada yang khawatir bahwa program peningkatan jalan ini berhubungan dengan proyek Pelabuhan Tanjung Mas. Alasan – alasan warga tersebut tidak bisa diterima oleh dinas terkait, karena perencanaan jalan telah dikerjakan sesuai peraturan teknis pembangunan dan memperhitungkan kondisi di lapangan. Selain itu beberapa alasan dari warga yang menolak bermacam macam, dimulai dari beberapa warga yang menolak masih menempati lahan negara, kemudian lahan warga

tidak memiliki sertifikat hak milik. Selain itu ada satu tokoh warga yang menolak rancangan ini, yaitu informan 8 dari RW 15 dan juga informan 11 dari RW 14. Sedangkan warga yang terdampak dan telah memiliki sertifikat tanah atau bangunan bersedia untuk pindah dengan nilai ganti rugi yang telah disepakati.

Informan 8 menjelaskan alasan dia menolak program peningkatan jalan ini dikarenakan ketakutan proyek ini berhubungan program dari Rencana Induk Pelabuhan, dimana apabila proyek ini selesai nanti pada akhirnya wilayah Tambak Lorok menjadi dermaga pelabuhan. Namun setelah mengikuti sosialisasi ke dua dan ketiga, rasa kekhawatiran tersebut hilang dan ikut mendukung adanya program ini. Kegiatan sosialisasi yang kedua dan ketiga memberikan informasi yang detail bahwa program ini benar benar merupakan program pemerintah dalam upaya peningkatan jalan di Kampung Bahari Tambak Lorok dan tidak ada hubungannya dengan Pelabuhan Tanjung Mas, karena ranahnya berbeda. Sebagai salah satu tokoh warga di RW 15, dengan adanya informasi tersebut, setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara informal oleh informan 8 melalui kegiatan forum RT dan forum RW saat bulan jumpa, dijelaskan kembali mengenai perkembangan program peningkatan jalan dan menampung aspirasi dari warga baik itu yang bersifat masalah, kritik dan saran. Sebagai tokoh masyarakat, Slamet juga menghimpun berbagai pertanyaan

yang ingin ditanyakan warga kepada dinas terkait. Sebagai pihak ketiga yang berkoordinasi langsung dengan lurah.

Informan 5, sebagai Lurah Tanjung Mas, memiliki kewenangan dalam setiap permasalahan yang terdapat diwilayahnya, khususnya dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok ini. Setiap permasalahan yang timbul dilingkungan administrasinya, informan 5 memiliki peran menjadi mediator untuk mendapatkan solusi. Ketika pembangunan jalan di Kampung Bahari Tambak Lorok, berbagai permasalahan yang muncul diselesaikan dengan sosialisasi informal kepada masyarakat. Sosialisasi informal yang dilakukan yaitu dengan *door to door* atau mengunjungi warga yang terlibat dalam masalah satu persatu dan setelah itu dikumpulkan dalam suatu forum untuk mencari jalan tengahnya. Permasalahan yang sering muncul ketika proses pembangunan yaitu mengenai pembebasan tanah dan bangunan, harga appraisal yang belum sesuai harapan warga, dan warga yang butuh pekerjaan. Informan 5 selalu berkoordinasi dengan Bappeda (informan 1) baik saat terdapat permasalahan atau tidak, segala permasalahan yang belum bisa diputuskan olehnya dibawa ke ranah Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan lebih luas.

Informan 4 sebagai pengawasan proyek menjelaskan, bahwa permasalahan yang timbul di Tambak Lorok ini selain permasalahan teknis berupa pembebasan lahan dan harga appraisal yang belum sesuai, terdapat masalah sosial yang muncul di masyarakat. Sebagai

syarat pembangunan dapat berjalan di daerahnya, warga melalui tokoh masyarakatnya membuat peraturan bahwa pekerja proyek harus dari warga lokal, kalau tidak, pembangunan tidak akan diperbolehkan jalan, arus lalu lintas bahan bangunan tidak diperbolehkan masuk di area Tambak Lorok. Disaat sosialisasi yang ketiga, permasalahan tersebut dibahas bersama dengan informan 1 hingga 10. Keinginan warga yang ingin diberikan pekerjaan disetujui oleh seluruh *stakeholder* yang hadir, namun tidak bisa semua pekerja dari warga lokal Tambak Lorok, karena dalam pembangunan jalan ini membutuhkan sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat dan pengalaman dalam membangun jalan model sarang laba-laba .

Informan 11, salah satu anak dari tokoh warga yang menolak keras adanya pembangunan jalan yang mengenai toko sembakonya, mejadi salah satu warga yang aktif bersuara untuk menolak. Berbagai alasan dimulai dari sosialisasi yang tidak menyeluruh yaitu ada beberapa informasi yang disembunyikan, merasakan adanya intimidasi dari proses sosialisasi yang terkesan warga harus segera menyetujui harga appraisal yang diberikan, hingga mempertanyakan perencanaan jalan yang tidak sesuai dengan konsep yang ia didapatkan yaitu mengenai ukuran jalan yang 20 meter, dan itu terlalu lebar untuk ukuran wilayah Tambak Lorok. Selain hal tersebut, informan 11 juga menjelaskan bahwa selama ini tokoh tokoh warga yang diundang tersebut tidak bisa mewakili warga yang terdampak, karena tokoh tokoh warga

tersebut rumah atau tanahnya tidak terkena proyek Kampung Bahari Tambak Lorok, jadi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Anas, sebagai warga yang terdampak.

Permasalahan yang muncul selama kegiatan sosialisasi menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini ditangani oleh informan 3. Mengetahui beberapa penolakan dari warga yang muncul, di sosialisasi terakhir, kembali dijelaskan mengenai perencanaan peningkatan jalan, dimulai dari desain dan ukurannya lebar jalan. Informan 3 menjelaskan ukuran jalan tersebut merupakan ukuran yang telah didesain oleh ahli dan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Ukuran jalan yang ada tersebut sebenarnya merupakan area akses jalan, jadi peningkatan jalan ini mengembalikan area jalan yang sekarang sudah menjadi tempat hunian warga Tambak Lorok, konsepnya yaitu jalan dikembalikan jalan, karena banyak rumah warga yang menjorok ke area jalan, jadi banyak rumah warga yang terkena proyek. Kemudian untuk perihal harga apraisal, saat sosialisasi tiap tiap warga yang terdampak, dipanggil secara bergantian untuk membahas ganti rugi lahan apabila tidak setuju, langsung dilaksanakan pengukuran ulang pada saat itu juga, kalau setuju dilanjutkan proses pengambilan uang.

Gambar 3.6.1 Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan jalan dan Pengadaan tanah



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 2018

3.7. Pelibatan dan Keterlibatan Warga Tambak Lorok

Pelaksanaan sosialisasi yang telah terlaksana sebanyak 15 kali, yang dimulai dari sosialisasi umum tingkat kelurahan, sosialisasi RTH dan pasar, dan terakhir sosialisasi peningkatan jalan, memunculkan berbagai data data temuan yang berkaitan tentang pelibatan dan keterlibatan warga dalam program Kampung Bahari Tambak Lorok. Berikut penjabaran dari masing masing kegiatan sosialisasi

- Sosialisasi Umum Tingkat Kelurahan

Sosialisasi yang pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Bappeda ini, pada awalnya mengundang beberapa perwakilan warga dan tokoh warga untuk menyiapkan perencanaan konsep sosialisasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi karakter masyarakat. Informan 5 hingga 10 yang diundang diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana karakter warga Tambak Lorok dan bagaimana cara

menghadapinya. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mengenali secara jelas, supaya pada waktu pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan lancar. Kemudian informan 1 menjelaskan bahwa ketika sosialisasi pertama tersebut banyak warga-warga yang menanyakan mengenai pembebasan tanah program Kampung Bahari Tambak Lorok, daerah mana saja yang akan terdampak, karena warga masih khawatir perihal lahan bangunan mereka. Untuk keterlibatan sendiri, selain bertanya, warga juga diberikan kesempatan untuk memberikan kritik, saran dan usul sebanyak banyaknya, karena pemerintah ingin mendengar pendapat dari warga Tambak Lorok supaya dapat mengetahui sejauh apa informasi yang telah dipahami oleh warga.

- Sosialisasi RTH dan Pasar

Tahap sosialisasi yang kedua ini, pelibatan warga sangat kecil, karena posisi warga merupakan objek dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Segala hal yang berhubungan dengan perencanaan dan desain menjadi wewenang Kementerian PUPR sehingga warga hanya dapat menerima atau menolak dalam hal pembebasan tanah dan atau bangunan. Kemudian untuk keterlibatannya warga juga terbatas, warga diberikan kesempatan yang besar untuk bertanya, memberikan saran, kritik dan usul. Setiap sosialisasi yang dilaksanakan hanya seperti itu saja keterlibatan masyarakat. Informan 10 menjelaskan bahwa keterlibatan dan pelibatan warga Tambak Lorok memang terbatas dan hanya sebatas bertanya, kritik, saran dan usul. Selain itu juga, akses

informasi selain ketika kegiatan sosialisasi warga hanya mengandalkan tokoh tokoh warga serta kegiatan bulan jumpa untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika tidak ada kegiatan sosialisasi, warga mengandalkan tokoh tokoh warga untuk mencari informasi. Informan 5 menambahkan, dalam sosialisasi RTH dan Pasar, keterlibatan warga cukup berhasil walaupun terbatas, yaitu ketika memberikan usulan mengenai jalur belokan yang awalnya jauh dari pasar, setelah mendapatkan usulan dari warga , desain dirubah dan menyesuaikan usulan dari warga .

- Sosialisasi Peningkatan Jalan

Pelaksanaan sosialisasi tahap akhir ini, merupakan sosialisasi yang lebih banyak dari biasanya, karena telah dilaksanakan hingga 7 kali. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya berbagai masalah yang muncul. Dalam hal pelibatan sendiri, hampir sama dengan sosialisasi yang lain, bahkan untuk sosialisasi ini sangat kecil kemungkinan adanya pelibatan, namun untuk keterlibatan sendiri, warga selalu diberikan kesempatan untuk bertanya, usulan, kritik dan saran serta berkoordinasi mengenai harga *appraisal* yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Informan 3 membenarkan informasi tersebut, bahwa ketika sosialisasi dilaksanakan keterlibatan warga hanya sebatas bertanya, memberikan usul, kritik dan saran, selain itu tidak ada. Karena dari awal bahwa program Kampung Bahari ini datang dari pusat, sehingga perencanaan dan desainya sudah ada dari

sana, kita pemerintah tinggal menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab.

3.8. Hasil Akhir Sosialisasi Program Kampung Bahari

Tambak Lorok

Pembangunan Program Kampung Bahari Tambak Lorok yang meliputi pembangunan RTH dan Pasar serta peningkatan jalan dan drainase telah menyelesaikan proses sosialisasi yang telah direncanakan oleh seluruh dinas dinas terkait. Dimulai dari Bappeda yang melaksanakan kegiatan sosialisasi umum di tingkat kelurahan, kemudian Dinas Tata Ruang yang melakukan sosialisasi Ruang Terbuka Hijau dan Pasar serta terakhir Dinas Pekerjaan Umum yang melaksanakan sosialisasi peningkatan jalan. Ketiga dinas tersebut saling berkoordinasi dengan Satker PKPS dari Kementerian PUPR, Lurah Tanjung Mas dan tokoh tokoh warga untuk mensuksesnya program Kampung Bahari Tambak Lorok.

Total pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan hingga 2019 berjumlah 15 kali, dimana kegiatan sosialisasi mayoritas diadakan di Balai Kelurahan Tanjung Mas, Kantor Bappeda Semarang, dan kantor DPU. Dari seluruh kegiatan tersebut, berikut rangkuman dari rangkaian pelaksanaan sosialisasi :

- **Sosialisasi Umum Tingkat Kelurahan, Sosialisasi RTH dan Pasar, dan Sosialisasi Peningkatan Jalan**

Pelaksanaan Sosialisasi Umum Tingkat Kelurahan berjalan tanpa adanya gejolak permasalahan yang timbul cukup besar. Koordinasi yang dilakukan antar dinas dinas terkait berjalan dengan baik. Informan 1,2,3 dan 4, menjelaskan keterlibatan warga sangat aktif terlihat dari komunikasi dua arah yang terbentuk. Kemudian selama proses sosialisasi, terdapat beberapa warga yang awalnya menolak karena ada kekhawatiran akan mengenai rumah nya atau tidak, kemudian setelah dijelaskan lebih detail oleh narasumber, warga yang awalnya menolak dapat menerima dan ikut mendukung program Kampung Bahari Tambak Lorok.

Informan 1, menjelaskan, pihak ketiga yang digunakan oleh dinas dinas terkait untuk melaksanakan sosialisasi informal kepada warga melalui kegiatan warga yaitu pengajian, bulan jumpa ataupun forum warga berjalan sesuai rencana. Awalnya banyak warga yang ragu dengan kehadiran program Kampung Bahari Tambak Lorok, namun setelah diberikan sosialisasi oleh pihak ketiga yang terdiri dari Lurah Tanjung Mas, tokoh tokoh warga dari RW 12 – 16, warga sangat mendukung karena senang kampungnya akan dibangun.

Informan 7,8 dan 9, menyatakan dalam kegiatan sosialisasi umum di balai kelurahan, materi yang disampaikan dari pihak

Bappeda dan dinas dinas terkait mudah dipahami. Selama proses sosialisasi pertanyaan, kritik, dan saran yang diberikan oleh warga yang hadir direspon langsung oleh Bappeda dan tim. Kemudian dari dampak yang sudah dirasakan oleh warga, yaitu kepedulian warga terhadap lingkungan telah terlihat dari kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Dapat diketahui sebelumnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan di Tambak Lorok telah jadi hal yang biasa, sehingga kesan kumuh selalu terlihat. Dampak yang kecil tersebut dapat dirasakan oleh warga tahap demi tahap.

Dampak positif juga dinyatakan oleh informan 9, bahwa selama kegiatan sosialisasi berlangsung, antusias warga di RW 16 semakin meningkat, banyak warga yang semakin rajin memproduksi hasil olahan kerajinan dari kerang, barang barang bekas, produk kuliner berbahan dasar ikan dan usaha percetakan. Warga di RW 16 ingin ketika program Kampung Bahari Tambak Lorok sudah selesai 100%, warga ingin memposisikan sebagai tuan rumah yang baik dan menjadi penggerak perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Ketika banyak pengunjung yang datang dan bertransaksi di disini, secara tidak langsung perekonomian warga juga secara perlahan pendapatannya meningkat, hal tersebut dapat dilihat ketika aktivitas jual beli pasar, lahan parkir yang dikelola warga, aktivitas pelelangan ikan serta

Kegiatan Usaha Bersama yang diadakan oleh ibu-ibu warga Tambak Lorok. Informan 10 menjelaskan bahwa Kegiatan Usaha Bersama tersebut merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memberdayakan warga Tambak Lorok untuk menjadi mandiri, dan mendukung program Kampung Bahari. Pemberdayaan tersebut telah dikoordinasikan dengan mengajak seluruh *stakeholder* terkait pada masing-masing bidang untuk memberikan pelatihan di wilayah Tambak Lorok, selain itu warga Tambak Lorok saat ini aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Kampung Bahari nantinya, yaitu dengan membuat berbagai proposal kegiatan yang diajukan pemerintah, supaya berbagai kegiatan penunjang perekonomian, dan pemberdayaan warga semakin sering dilaksanakan dan harapannya menjadi rutinitas tahunan pemerintah.

Informan 1 dan 4 membenarkan bahwa masing-masing dinas di Kota Semarang saling berkoordinasi untuk mengadakan beberapa pelatihan untuk warga Tambak Lorok guna mendukung program Kampung Bahari Tambak Lorok. Sebagaimana mestinya, peran pemerintah tidak hanya membangun secara fisik, namun membangun sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran pendampingan kepada masyarakat.

Pendampingan warga sangat diperlukan oleh warga Tambak Lorok, namun menurut informan 10, hal sebaliknya yang

terjadi dilapangan, pelatihan sering diadakan di wilayah sini, dari mulai produk kerajinan, olahan makanan hingga bantuan jaring untuk nelayan. Seringkali bantuan yang diberikan kepada nelayan disini tidak disertai dengan pendampingan setelah adanya pelatihan. Sehingga setelah pelatihan selesai, warga warga tidak bisa memakai bantuan alat yang diberikan oleh Pemerintah Kota dan pada akhirnya tidak digunakan dan terbengkelai. Selain itu bantuan yang diberikan kepada nelayan tersebut tidak semua nelayan mendapatkan nya, dan ada juga yang mendapatkan bantuan tapi tidak bekerja sebagai nelayan. Usaha pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya tidak efektif dengan permasalahan yang muncul tersebut.

Tanggapan warga yang beragam juga dijelaskan oleh informan 7,8 dan 9 ,dari proses berjalanya sosialisasi Program Kampung Bahari Tambak Lorok dan pembangunan fisik, dimulai dari perubahan perilaku warga yang disipilin untuk membuang sampah pada tempatnya, mulai memisahkan antara sampah yang harus dibuang atau dapat didaur ulang menjadi kerajinan, membangun bisnis percetakan kaos, mengolah produk produk olahan berbahan dasar hasil laut berupa ikan asap, dan berbagai krispi *seafood*. Respon warga yang demikian juga dijelaskan oleh informan 5, Margo. Margo menyatakan bahwa warga di Tambak Lorok berlomba lomba dalam membangun kegiatan perekonomian

yang dapat mendukung program Kampung Bahari Tambak Lorok, ditambah berbagai pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah dan CSR dari BUMN, memicu semangat warga untuk bergerak dalam memajukan wilayahnya. Saat ini produk produk olahan dari warga Tambak Lorok yang siap jual telah di pamerkan di beberapa kegiatan expo UMKM di acara acara Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan warga Tambak Lorok. Konsep pemberdayaan warga menempatkan warga menjadi pelaku dari perubahan sosial yang dihasilkan dari pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga posisi pemerintah bukan sebagai penggerak roda perekonomian , namun menjadi pelaksana dari berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas masyarakat.

Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan seluruh *stakeholder* terkait, mendapatkan respon yang positif dari warga Tambak Lorok, walaupun ada beberapa warga yang secara keras menolak. Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah kendala. Sebagai bentuk pembangunan yang diinisiasi oleh Presiden RI melalui Kementerian PUPR, pembangunan Kampung Bahari berupaya untuk mensejahterahkan warga dengan berbagai fasilitas yang telah dibangun serta penunjang fasilitas pelatihan yang diberikan oleh dinas dinas terkait. Warga sangat senang dan gembira dengan kehadiran

program ini. Suparmin salah satunya, ia menyatakan bahwa program ini sangat memberikan dampak positif bagi Tambak Lorok khususnya RW 12, warga disini semakin aktif untuk mengadakan kegiatan kegiatan yang mendukung program Kampung Bahari. Selain itu respon positif juga dijelaskan oleh Slamet. Slamet bercerita ketika program ini muncul untuk pertama kalinya, warga RW 16 secara terbuka mendukung dan akan mengawal proses pembangunanya supaya sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang. Warga RW 16 sangat antusias, bahkan ada warga yang sudah berencana membuat sebuah cafe atau rumah makan yang menyediakan olahan hasil laut dari nelayan nelayan disini, sehingga warga disini dapat semakin maju dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikanya.

3.9. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Kampung Bahari Tambak Lorok

Serangkaian sosialisasi yang telah dilaksanakan dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan dilapangan, memunculkan berbagai faktor penghambat dan juga pendukung dari keberlangsungan proses sosialisasi. Berikut uraian faktor penghambat dan pendukung :

- **Faktor Penghambat**

Sosialisasi yang telah berlangsung dari awal hingga akhir, memunculkan berbagai penghambat, dimana penghambat tersebut

ada dua hal , yang teknis dan non teknis. Untuk yang teknis sendiri, dijelaskan oleh informan 2 dan 3, bahwa masih terdapat warga warga yang kurang begitu paham dengan materi yang disampaikan, karena masih terdapat beberapa materi dengan bahasa yang kurang bisa dipahami, selain itu informan 3 menjelaskan bahwa beberapa warga masih belum menyetujui harga *appraisal* yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memperlambat proses pembangunan fisik. Selain penghambat yang bersifat teknis, faktor non teknis juga muncul, informan 4 menceritakan bagaimana warga Tambak Lorok itu masih memiliki sifat labil dalam memutuskan keputusan, kejadian tersebut terjadi ketika pembangunan irigasi didepan toko milih salah satu warga , pemilik toko minta ganti rugi, karena beranggapan pembangunan dapat menurunkan pendapatata, setelah adanya mediasi, tercapai kesepakatan dimana pelaksana wajib membayar sejumlah uang, pada hari berikutnya, uang tersebut diberikan dan juga pembangunan irigasinya, namun pemilik tokoh menolak kesepakatan yang disetujui pada hari sebelumnya, dan meminta kesepakatan lagi. Selain permasalahan tersebut, latar belakang warga pesisir yang memiliki karakter yang keras, sensitif, tingkat pendidikan yang mayoritas lulusan SMP/Mts serta tingkat perekonomian yang terbatas membuat butuhnya usaha yang lebih untuk melakukan pendekatan kepada warga Tambak Lorok.

- Faktor Pendukung

Pendukung kelancaran proses sosialisasi terdiri dari berbagai hal, informan 1 menjelaskan dimulai dari pemilihan narasumber yang merupakan warga asli Kota Semarang dan memiliki kemampuan untuk berbahasa yang dipahami oleh warga Tambak Lorok. Selain itu kehadiran tokoh warga sangat membantu kelancaran sosialisasi dan edukasi ditingkat masyarakat, dan pemerintah secara tidak langsung memiliki kesempatan untuk mengetahui masalah masalah yang muncul di warga dari laporan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, dengan langkah tersebut pemerintah dapat menyiapkan jawaban atas permasalahan yang muncul di benak warga . Informan 4 menambahkan, warga yang awalnya khawatir dan memiliki keraguan, akhirnya berbalik mendukung dan sangat aktif dengan kegiatan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, dengan hal tersebut memudahkan proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan warga akan dengan mudah tereduksi.

3.10. Proposisi Sementara

Proposisi sementara ini menjelaskan bagaimana kesimpulan dari hasil temuan peneliti yang telah dilakukan selama proses penelitian dengan melakukan *indept interview* kepada 11 informan, yang terdiri dari 4 pegawai dinas terkait (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan Satker Kementerian PUPR) , kemudian ada 5 orang yang terdiri dari Lurah Tanjung Mas, Koordinator BKM, warga terdampak dan 4 tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut yang telah diuraikan oleh peneliti di penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan

dari ke empat proposisi yang telah ditetapkan sebelumnya, hanya terdapat satu proposisi yang mendekati atau sesuai dengan pola pola yang terbentuk ketika penelitian dilakukan oleh peneliti.

Proposisi yang mendekati dengan hasil temuan dari peneliti, yaitu proposisi empat. Namun dari data temuan yang ditemukan oleh peneliti, terdapat pengembangan dari proposisi yang telah diprediksi. Pertama, yaitu mengenai kegiatan sosialisasi, yang pada saat pelaksanaan edukasi yang diberikan yaitu mengenai perencanaan, tujuan dan manfaat mengenai program Kampung Bahari Tambak Lorok dan memberikan edukasi mengenai pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk kegiatannya sendiri terdiri dari pengenalan mengenai Kampung Bahari terlebih dahulu, setelah itu ada penjelasan mengenai konsep sebuah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, dimana pembangunan ini yang dimaksud adalah pembangun baik secara fisik maupun secara sumber daya manusianya. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sosialisasi sosialisasi program yang lain, yaitu RTH dan pasar, serta peningkatan jalan dan juga adanya pelatihan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas dinas terkait Dalam setiap sosialisasi selalu diberikan kesempatan kepada warga untuk bertanya, kritik, saran dan usul, dan akan diberikan jawaban langsung oleh pemerintah. Dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, warga mulai memahami bagaimana pentingnya sebuah pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok, serta dampak jangka panjangnya seperti apa. Selain itu warga Tambak Lorok semakin aktif untuk meningkatkan usahanya dalam membangun sebuah usaha dan memulai usaha

barunya. Ditambah kebiasaan warga yang suka membuang sampah sembarangan saat ini telah berkurang dan warga memiliki inisiatif untuk membuat tong sampah didepan rumah mereka masing masing.